

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *e-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Tepi Peirisal¹, Lina Kurniasih², Endang Suryana, Tony Damianus Debatara

Dosen Tetap Program Pascasarjana Universitas Subang¹,
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Subang²
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Subang³
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Subang⁴

teypei@gmail.com / tepipeirisal@unsub.ac.id, lienapandi1981@gmail.com,
endangdamkarsubang@gmail.com, tony.debatara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya Implementasi Kebijakan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang, maka peneliti menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut indikator yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit. Model pendekatan Implementasi ini dipandang tepat dengan permasalahan penelitian karena indikator penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan *e-Government* dipengaruhi oleh *Content Development*, *Competency Building*, *Connectivity*, *Cyber laws*, *Citizen Interfaces*, dan *Capital*.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa, belum optimalnya Implementasi Kebijakan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dipengaruhi oleh faktor *Content Development* (Pengembangan isi/ Aplikasi perangkat lunak), *Competency Building* (Pengadaan SDM), *Connectivity* (Ketersediaan Infrastruktur), *Cyber laws* (Perangkat Hukum), *Citizen Interfaces* (Pengembangan berbagai kanal akses), dan *Capital* (Permodalan). Dimana hal ini dilihat dari : Nilai indeks evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tidak mencapai target yaitu 2,44 dari target 3,2, kemudian keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang IT dan tenaga teknis untuk mengelola administrasi dan pengelolaan informasi Digital, Infrastruktur yang belum memadai, dan belum mapannya strategi serta kurang memadainya anggaran yang di alokasikan untuk penerapan *e-Government*.

Atas temuan penelitian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola layanan *e-Government* dalam melakukan pengembangan sistem terhadap website-website harus lebih dioptimalkan lagi, pengembangan kompetensi SDM dan ketersediaan Infrastruktur penunjang diharapkan juga lebih ditingkatkan lagi dan menyangkut pola permodalan agar diusahakan ada skema lain berupa kerjasama dengan badan usaha dan atau dengan *Cost Sharing*. Sehingga Implementasi Kebijakan *e-*

Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, e-Government

Abstract

This research is entitled Implementation of e-Government Policy in Subang District Government. The aim is to find out the Implementation of e-Government Policy in the Local Government of Subang Regency and to find out the factors that determine the success or failure of the Implementation of e-Government Policy in the Local Government of Subang Regency.

Based on the problems in the background, the researchers used a policy implementation approach according to the indicators put forward by Richardus Eko Indrajit. This implementation approach is considered appropriate with the research problem because the determining indicators of the success or failure of an e-Government policy implementation are influenced by: Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber laws, Citizen Interfaces, and Capital.

The conclusion from the results of the research conducted is that the implementation of e-Government Policy in the Subang Regency Local Government environment is not yet optimal, influenced by factors: Content Development (Development of content/software applications), Competency Building (HR Procurement), Connectivity (Infrastructure Availability), Cyber laws (Legal Instruments), Citizen Interfaces (Development of various access channels), and Capital (Capital). This can be seen from: The value of the electronic-based government system evaluation index (SPBE) within the Local Government of Subang Regency which did not reach the target of 2.44 out of the target of 3.2, then the limitations of Human Resources (HR) with an IT background and technicians to managing the administration and management of digital information, inadequate infrastructure, and not yet established strategy and inadequate budget allocated for implementing e-Government.

Based on the research findings above, the Office of Communication and Informatics as the manager of e-Government Services in developing systems for websites must be further optimized, developing HR competencies and the availability of supporting infrastructure is expected to also be further improved and related to capital so that other schemes are endeavoured in the form of cooperation with business entities and or with Cost Sharing. So that the Implementation of e-Government Policy within the Local Government of Subang Regency can run optimally.

Keywords: Policy Implementation-Government

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi, serta akses informasi yang semakin meningkat, menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara akurat dan cepat. Terkhusus informasi

terkait dengan pelayanan publik. Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang merata bagi warga negara. Sehingga, dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, pemerintah seharusnya

berusaha memperbaiki kualitas pelayanannya. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu memberikan pelayanan kepada warganya dengan standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur

Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Implementasi *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang menyatakan bahwa *e-Government* adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Maksud ditetapkannya implementasi *e-government* adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.

E-Government merupakan langkah yang digunakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi dan kebijakan yang disediakan oleh pemerintah. Artinya, penggunaan *e-Government* merupakan perubahan baru yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi atau layanan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat sehingga terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Implementasi *e-Government* untuk pelayanan publik pada tataran pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien, serta dapat pula meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good*

governance). Pemerintah Daerah bekerja secara optimal dan terbuka kepada masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya visi pemerintah untuk dapat mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh Masyarakat

Peraturan terkait dengan pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Subang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menyatakan bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan maka perlu didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu. Adapun isi pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah meliputi : tata kelola SPBE, manajemen SPBE, keabsahan dokumen elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE

Website Pemerintah Daerah merupakan sarana informasi yang sangat penting pada era keterbukaan informasi publik pada saat ini. Melalui website yang dimiliki, Pemerintah Daerah dapat menginformasikan kepada publik/masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga publik/masyarakat dapat mengetahui segala informasi dan perkembangan yang terjadi di daerahnya. Demikian halnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, selain memiliki website Pemerintah Daerah, beberapa SKPD lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten Subang juga memiliki website tersendiri, sehingga informasi yang berkaitan dengan program, kegiatan, tugas dan fungsi SKPD dapat diketahui oleh masyarakat melalui website ini

table 1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Subang 2021

1.2 Identifikasi masalah

- Bagaimana Implementasi Kebijakan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang?
- Faktor apa saja yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses Implementasi Kebijakan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang?

KAJIAN PUSTAKA

Upaya pencapaian tujuan ini sengaja diulang-ulang untuk menegaskan dan sekaligus mengingatkan bahwa kegiatan implementasi kebijakan adalah sebuah alat atau cara untuk mencapai tujuan. Artinya kegiatan implementasi itu bukan sebuah tujuan sehingga ketika kegiatan sudah dilakukan bukan berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil dengan baik. Ukuran keberhasilan itu harus diuji dengan model atau mekanisme tersendiri berikut tolok ukur atau parameternya, meskipun sangat terkait dengan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan

Dalam kaitan ini keberadaan berbagai model yang digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan diimplementasikan yang di kaitkan dengan tujuan itu bukan sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan telah mencapai tujuannya. Tujuan tersebut adalah semacam panduan atau petunjuk (*guidelines*) yang harus dituju pelaksana atau *stakeholders* kebijakan. Jadi,

keberadaan sebuah model untuk melihat bagaimana kebijakan itu diimplementasikan itu tidak berpretensi mampu memberikan gambaran hingga pada sebuah pencapaian tujuan terutama mengenai hasil dan manfaatnya. Gambaran yang diberikan biasanya hanya sampai pada sebuah produk atau *output*, misalnya kegiatan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan atau

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. SUBANG		2,44 (Cukup)
Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek		
	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	2,44
	Domain Kebijakan SPBE	2,60
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,60
	Domain Tata Kelola SPBE	2,20
	Perencanaan Strategis SPBE	2,00
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
	Penyelenggara SPBE	2,50
	Domain Manajemen SPBE	1,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Audit TIK	1,00
	Domain Layanan SPBE	3,05
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,30
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,67

pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana SOP. Mengenai model yang bisa digunakan untuk mengukur bagaimana hasil dan manfaat sebuah produk pemerintahan, maka harus digunakan model tersendiri untuk mengukurnya

Sekali lagi perlu dikemukakan bahwa keberadaan model ini bukan digunakan untuk melihat bagaimana tujuan itu diraih, Melainkan sebagai sasaran antara atau cara untuk menghantarkan pada tercapainya tujuan. Jika ternyata ada kesenjangan antara pelaksanaan kebijakan yang dianggap berhasil, namun fakta pencapaian tujuan yang ditetapkan tidak menunjukkan hal demikian, maka fakta demikian memerlukan model lain yang dimaksudkan untuk mengukur sebuah pencapaian hasil atau kinerja kebijakan. Tentunya model implementasi kebijakan tidak cukup jika digunakan untuk maksud tersebut karena sejak awal keberadaannya tidak dirancang untuk mengukur hal demikian karena memang model untuk mengukur bagaimana kebijakan itu dilaksanakan dan bukan bagaimana mencapai hasil.

Hal demikian ini penting dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam melihat bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Jadi bukan pada proporsinya jika sebuah model implementasi kebijakan digunakan untuk melihat bagaimana pencapaian sebuah tujuan kebijakan, seolah jika kebijakan itu masuk kategori baik dalam pelaksanaannya, maka hasil yang dicapai juga tergolong baik

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yakni sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau, dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan sebuah organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurung waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian. metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat detesis, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu obyek, suatu set kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

HASIL PENELITIAN

1) Dimensi Content Development

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran implementasi tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

Dalam penerapan *e-government* hal yang pertama harus diperhatikan

adalah *Content Development* atau pengembangan isi dimana didalamnya menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem *basic data*, kesepakatan *user interface*, dan lain sebagainya

Content Development ini sendiri bagian yang masih kurang lengkapnya web untuk pelaksanaan pengembangan ke daerah-daerah pelosok kemudian web yang masih sering error (Sulit untuk di Akses) sehingga dapat mengakibatkan pemberian informasi kepada masyarakat apalagi yang tinggal di daerah pelosok menjadi tertunda atau malah bisa menyebabkan ketinggalan informasi.

Sangat perlu diperhatikan sekali sebagai ujung tombak penyampaian informasi kepada publik keberadaan web sebagai tahap awal pelaksanaan *e-government* sangatlah penting. Ketersediaan informasi dan berita yang ada harus sangat diperhatikan guna memberikan pelayanan yang baik adalah dengan penyediaan informasi yang selalu diperbaharui dan benar adanya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang salah satunya menyebutkan bahwa fungsinya adalah "Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara *Content Development* atau pengembangan isi / pengembangan *content*. Dalam hal dimensi pengembangan isi tersebut pemerintah daerah kabupaten subang telah melakukan usaha semaksimal mungkin dalam rangka pelayanan baik itu untuk internal maupun eksternal,

namun meskipun demikian tetap saja ada kelemahan dalam hal pengembangan isi tersebut. Yang masih kurang dari *Content Development* ini sendiri adalah masih saja kurang lengkapnya web, kemudian web yang ada tersebut masih sering error (sulit untuk di akses), sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan pemberian informasi kepada masyarakat menjadi tertunda bahkan bisa sampai mengakibatkan ketinggalan informasi, hal itu biasanya terjadi pada tingkat pemerintah desa terutama yang berada di pelosok-pelosok daerah

2) Dimensi *Competency Building*

Dalam dimensi *Competency Building* atau pembentukan kompetensi adalah yang menyangkut pengadaan dalam sumber daya manusia (SDM). Dimana hal tersebut sangat penting dalam pelaksanaan implementasi *e-government*. Kompetensi yang dimaksud adalah keadaan sumber daya manusia yang ahli pada bidangnya. Contohnya adalah dibutuhkan ahli komputer untuk mengurus web milik pemerintah daerah. Serta dibutuhkan teknisi yang memadai dan handal untuk melakukan segala pekerjaan yang membutuhkan kebutuhan khusus seperti pengolahan internet, pemasangan internet, *design web*, penulisan artikel dan lain sebagainya

Dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Pengembangan SDM pada penerapan *e-government* itu termasuk pada tahap 1 yaitu Persiapan. Dimana salah satu aspek penting dari persiapan penerapan *e-government* adalah sumber daya manusia yang memadai dan salah satu bentuk dari peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah dengan pelatihan, Bimtek, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dimensi *Competency Building* pada implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah

daerah Kabupaten Subang masih membutuhkan pembenahan

Competency Building (Kompetensi SDM / Pembangunan Kompetensi SDM), yang merupakan salah satu dimensi yang penting yang dapat mempengaruhi implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang, bahwa pada saat ini upaya peningkatan kompetensi SDM TIK belum dapat dilaksanakan secara maksimal dimana hal tersebut dikarenakan oleh keterbatasan anggaran pelatihan / sertifikasi. Maka dari uraian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dalam hal *Competency Building* dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang masih belum sepenuhnya berjalan optimal

Dimana hal itu terlihat dari pelaksanaan peningkatan SDM TIK yang bisa terlaksanakan untuk event / pelatihan tanpa biaya, yang mana biasanya dilaksanakan oleh *digital talent scholarship (Digitalent)* Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo RI serta Kementerian / Badan Pusat lainnya. Jadi pada intinya pelayanan dalam rangka pelaksanaan *e-government* masih kurang ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kemudian masih kurangnya ketersediaan SDM yaitu khususnya yang berlatar belakang pendidikan IT dan jumlah tenaga teknisi untuk mengelola administrasi dan pengolahan informasi digital di dalam implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang

3) Dimensi *Connectivity*

Bentuk konektivitas yang dimaksud adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana *e-government* diterapkan. Atau dengan kata lain bentuk konektivitas yang dimaksud adalah ketersediaan infrastruktur dalam rangka penerapan *e-government*. Dimana dalam

kenyataannya keadaan infrastruktur tersebut belum memadai dan mahal, yang masih belum tersebar secara merata, kemudian disamping itu tempat akses informasi yang masih terbatas jumlahnya

Pemerintah kabupaten subang masih belum optimal menerapkan keseluruhan aspek manajemen SPBE, dimana dalam data dukung yang disampaikan tidak dijumpai substansi yang memenuhi persyaratan indikator serta masih belum optimal menerapkan audit infrastruktur SPBE

Pelaksanaan implemetasi *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya optimal hal tersebut terlihat dari infrastruktur penunjang masih banyak yang perlu ditingkatkan walaupun terdapat juga beberapa langkah-langkah dalam upaya menanggulangi kendala tersebut

4) Dimensi Cyber law

Di dalam implementasi *e-government* terdapat dimensi yang juga sama penting agar pelaksanaan implementasi *e-government* bisa berjalan optimal. Dimensi tersebut adalah *Cyber Laws* atau kerangka dan perangkat hukum tentang *e-government* yang menjadi sebuah hal yang perlu disediakan. Hal ini dikarenakan adanya peluang pelanggaran secara *Cyber*.

Peraturan mengenai implementasi *e-government* dan turunannya saat ini sudah di buat oleh pemerintah daerah kabupaten subang, hal itu tertuang dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Implementasi *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, selain itu ada juga Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah kabupaten

subang, pemerintah daerah kabupaten subang sudah membuat kebijakan mengenai hal tersebut, akan tetapi seperti halnya Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SPBE sudah mengatur seluruh siklus penerapan SPBE, namun tetap saja dalam pelaksanaannya belum optimal. Padahal dari sisi kebijakan bahwa payung hukum dalam implementasi *e-government* yang ada pada saat ini sangat berpengaruh terhadap penerapan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang, karena merupakan pedoman dalam setiap kegiatan penerapan *e-government* di pemerintah daerah kabupaten subang

5) Dimensi Citizen interface

Dalam implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang, dimensi *Citizen Interface* juga berperan penting. Yang mana didalam *Citizen Interface* tersebut menyangkut pengembangan berbagai kanal akses (*multi access channels*) dan juga mengenai pengadaan SDM pun termasuk didalamnya, yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan *stakeholder e-government* dimana saja dan kapan saja mereka inginkan

Implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang, dimensi *Citizen Interface* atau maksudnya adalah pengembangan berbagai kanal akses (*multi access channels*) dan pengadaan sumber daya manusia (SDM) juga sangat mempengaruhi karena agar upaya dalam implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang bisa optimal dalam penerapannya

Sudut pandang yang berbeda bahwa kanal akses (*multi access channels*) dan pengadaan SDM di dalam penerapan *e-government* juga harus ditingkatkan agar dapat dipergunakan

oleh seluruh masyarakat dan *stakeholder e-government* dimana saja dan kapan saja mereka inginkan dan butuhkan

6) Dimensi Capital

Didalam pelaksanaan implementasi *e-government* terdapat dimensi *Capital* yang juga mempengaruhi dalam penerapannya. Adapun dimensi *Capital* tersebut maksudnya adalah yang menyangkut pola permodalan proyek *e-government* yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan, disini tim harus memikirkan jenis-jenis model pendapatan (*revenue model*) yang mungkin untuk diterapkan di pemerintahan

Belum mapannya strategi serta kurang memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan dalam penerapan *e-Government* di lingkungan pemerintah kabupaten subang. Sumber permodalan yang hanya didapat dari APBD Kabupaten Subang untuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola layanan *e-government* dinilai masih kurang untuk penerapan implementasi kebijakan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang yang optimal

Layanan *e-government* Diskominfo Kabupaten Subang yang menurutnya bahwa, Saat ini Diskominfo sedang mengusahakan skema lain berupa kerjasama dengan badan usaha dalam penerapan *egovernment* di pemerintah daerah Kabupaten Subang. Sehingga dengan upaya tersebut implementasi kebijakan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang bisa optimal dari segi *capital* atau permodalan

KESIMPULAN

1) Nilai indeks evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tidak mencapai target yaitu 2,44 dari target 3,2 atau dengan kata lain implementasi kebijakan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang masih belum optimal

- 2) Pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), hal tersebut terlihat dari masih kurangnya ketersediaan SDM khususnya yang berlatar belakang IT dan tenaga teknis untuk mengelola administrasi dan pengolahan informasi digital. Selain itu juga karena keterbatasan anggaran pelatihan/sertifikasi
- 3) Infrastruktur yang belum memadai dan mahal, yang masih belum tersebar secara merata, kemudian tempat akses informasi yang masih terbatas jumlahnya. Infrastruktur penunjang masih banyak yang perlu ditingkatkan apabila ingin menerapkan *e-government* secara optimal
- 4) Belum mapannya strategi serta kurang memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan dalam rangka implementasi kebijakan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten subang karena masih hanya bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Subang, dan karena ada beberapa aplikasi yang merupakan hibah dari pemerintah daerah lain atau mandatori dari pemerintah pusat

SARAN

- a) Pengembangan sistem terhadap website-website yang dilakukan oleh Diskominfo sebagai pengelola layanan *e-government* perlu dioptimalkan lagi,. Dan dalam pengembangan aplikasi-aplikasi

atau website tersebut dapat dilakukan dengan cara pengembangan mandiri atau dengan mereplikasi dari pemerintah daerah lain yaitu melalui kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka berbagi pakai aplikasi

- b) Pengembangan kompetensi SDM seperti *programming*, *data processing*, *web design*, dan lain sebagainya diharapkan bisa lebih di optimalkan lagi pelaksanaannya karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam rangka Implementasi Kebijakan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharismi. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*
Jakarta: Rhineka Cipta, 1993
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Albaar, M.R. 2020. *Implementasi E-Government dalam Menciptakan Pemerintahan Baik dan Bersih*. Cirebon: CV, Syntax Computama
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Djunaedi, Achmad. 2002. *Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press